



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

Disusun oleh:
Amelia Aryanti
1804431049

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Amelia Aryanti

1804431049

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Amelia Aryanti

NIM : 1804431049

Tanda tangan :



Tanggal : 12 Agustus 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amelia Aryanti
NIM : 1804431049
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, M.M., M.Ak, CA, CPIA. ()

Anggota Penguji : Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 22 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M.

NIP 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Amelia Aryanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431049
Jurusan / Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2017-2021

Disetujui oleh:

Pembimbing

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA.

NIP. 197202221999031003

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA.

NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan yang telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh jajaran pimpinan Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta
4. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai pembelajaran supaya skripsi ini lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

Depok, 12 Agustus 2022

Amelia Aryanti



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Aryanti
NIM : 1804431049
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

Yang menyatakan

Amelia Aryanti



PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Oleh:

Amelia Aryanti

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021 yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 berdasarkan rasio kemandirian memiliki kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas memiliki kategori efektif, rasio efisiensi memiliki kategori kurang efisien, rasio pertumbuhan mengalami penurunan dalam beberapa tahun dan kenaikan dalam satu tahun, rasio derajat desentralisasi memiliki kategori cukup. Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup baik dalam mengelola APBD-nya.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF SOUTH SUMATRA PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2017-2021

By:

Amelia Aryanti

D4 Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to measure and interpret the financial performance of the South Sumatra Provincial Government for the 2017-2021 fiscal year, which is assessed based on the ratio of independence, effectiveness, efficiency, growth, and the degree of decentralization. The type of research used is quantitative descriptive research using documentation techniques for data collection. The data used in this study is secondary data in the form of a report on the realization of the South Sumatra Provincial Government budget for 2017-2021. The results of this study indicate that the financial performance of the South Sumatra Provincial Government in 2017-2021 based on the independence ratio has a medium category with a participatory relationship pattern, the effectiveness ratio has an effective category, the efficiency ratio has a less efficient category, the growth ratio has decreased in several years and increased in one year, the ratio of degrees of decentralization has a sufficient category. In general, the financial performance of the South Sumatra Provincial Government is considered quite good in managing the budget.

Keywords: Regional Financial Performance, Independence, Effectiveness, Efficiency, Growth, Degree of Decentralization.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Pemerintah Daerah | 9 |
| 2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 9 |
| 2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik | 10 |
| 2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 10 |
| 2.5 Keuangan Daerah | 11 |
| 2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 11 |
| 2.7 Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 12 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| 2.9 Kerangka Pemikiran | 20 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 21 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 21 |
| 3.2 Objek Penelitian | 21 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian | 21 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 22 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 22 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 24 |
| 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian | 24 |
| 4.2 Analisis Data | 26 |
| 4.2.1 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Kemandirian..... | 26 |
| 4.2.2 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas | 28 |
| 4.2.3 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi..... | 31 |
| 4.2.4 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Pertumbuhan | 33 |
| 4.2.5 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi | 36 |
| BAB V PENUTUP | 39 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 39 |
| 5.2 Saran..... | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |
| LAMPIRAN | 48 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021..... | 2 |
| Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 2021..... | 3 |
| Tabel 2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Daerah..... | 13 |
| Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan..... | 14 |
| Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan..... | 15 |
| Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi..... | 16 |
| Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021..... | 27 |
| Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021..... | 29 |
| Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021..... | 31 |
| Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021..... | 34 |
| Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021..... | 37 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....20





DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017..... | 48 |
| Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018..... | 49 |
| Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019..... | 50 |
| Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020..... | 51 |
| Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021..... | 52 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya pergantian sistem pemerintahan dari masa orde baru ke era reformasi saat ini, membuka peluang lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan adanya transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian pada tahun 2014 diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk revisi atas UU Nomor 32 tahun 2004. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi penduduk setempat (Sirait et al., 2022).

Otonomi daerah memberikan kesempatan terbuka kepada pemerintah daerah untuk melihat segala permasalahan dan kebutuhan yang mendasar di daerahnya, sehingga diharapkan adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan sosial secara merata. Menurut Halim (2007) suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila (1) memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, artinya daerah harus mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangan daerahnya yang akan digunakan untuk menyelenggarakan dan membiayai pemerintahannya sendiri, (2) tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus relatif kecil supaya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian dari sumber keuangan yang tertinggi sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan adanya penerapan otonomi daerah, maka anggaran ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut (Putri et al., 2021). Pengukuran kinerja terhadap APBD perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD tersebut sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengukuran kinerja tersebut, dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya (Zuhri & Soleh, 2016).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu topik yang kerap diperbincangkan saat mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena tingkat penyerapan anggaran daerah yang rendah. Kejadian ini selalu terulang setiap tahun, sehingga menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang belum mampu untuk memanfaatkan APBD secara optimal (Saputra, 2021). Menurut Kemendagri (2021) Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki serapan anggaran belanja yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 2017 | 6.439.523.470.869,00 | 5.788.552.526.667,59 | 89,89 % |
| 2018 | 7.426.770.057.057,95 | 6.763.760.533.371,09 | 91,07 % |
| 2019 | 7.074.829.339.229,22 | 6.422.760.771.550,39 | 90,78 % |
| 2020 | 7.901.928.827.814,38 | 6.900.475.143.744,16 | 87,33 % |
| 2021 | 11.410.177.341.872,00 | 10.060.730.260.979,39 | 88,17 % |
| Rata-rata | | | 89,45% |

Sumber: Data diolah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, tingkat penyerapan anggaran pada Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dengan nilai rata-rata sebesar 89,45%. Pada tahun 2017, realisasi belanja sebesar 89,89%, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 91,07%, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase sebesar 90,78% lalu turun menjadi 87,33%. Pada tahun 2021 realisasi belanja mengalami sedikit kenaikan menjadi 88,17%. Padahal jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dinilai baik apabila kementerian negara/lembaga memiliki persentase penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 95%. Dengan serapan anggaran yang berfluktuasi pada Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Provinsi Sumatera Selatan belum mampu dilaksanakan secara maksimal.

Penyerapan anggaran pada pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu cara dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Dengan terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, diharapkan akan memperoleh penggunaan anggaran yang maksimal (Marbun, 2010). Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa. Data tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 2021

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|
| 2017 | 1.210.114.980.395,00 | 1.108.078.001.845,00 | 91,57 % |
| 2018 | 1.506.908.550.153,00 | 1.375.068.372.158,94 | 91,25 % |
| 2019 | 1.656.097.451.834,20 | 1.405.117.520.744,41 | 84,85 % |
| 2020 | 1.522.451.937.658,71 | 1.392.760.537.519,30 | 91,48 % |
| 2021 | 2.062.603.115.941,00 | 1.811.885.209.417,49 | 87,84 % |
| Rata-rata | | | 89,40 % |

Sumber: Data diolah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat dengan rata-rata sebesar 89,40%. Pada tahun 2017 realisasi belanja barang dan jasa memiliki persentase sebesar 91,57%, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar 91,25% dan 84,85%. Pada tahun 2020 realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan menjadi 91,48% kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 87,84%.

Tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan karena sumber daya manusia yang masih belum kompeten dalam melakukan pelayanan terhadap pengadaan barang dan jasa serta lambatnya proses tender akibat sistem administrasi yang terkendala (MediaIndonesia.com). Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yaitu banyaknya institusi yang ragu dan takut dalam menjalankan penyerapan anggaran, karena banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Hal ini pun sejalan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada pengaturan tender atau lelang pengadaan barang dan jasa, dengan adanya rasa takut para pejabat perbendaharaan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, akibatnya banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan sehingga penyerapan anggaran belanja dan jasa menjadi rendah (MAKI, 2021).

Dampak dari serapan anggaran yang rendah tersebut akan mereduksi akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dengan adanya kegagalan target pada penyerapan anggaran, akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, banyak dana yang tidak terpakai / menganggur karena dana yang telah dialokasikan sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tentu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, karena program yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi terhambat, seperti program pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta program investasi dan pengembangan usaha. Akibat lain dari serapan anggaran

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

yang kurang optimal akan menurunkan jumlah lapangan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi serta wajib untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat dinilai kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara baik dan benar serta sebagai pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (Sijabat et al., 2014). Analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sudah ditetapkan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Marlissa et al., 2021). Beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Pratama, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari dan Wuryani (2021) mengenai analisis kinerja pemerintah daerah pada Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2016 menjelaskan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Mojokerto dikategorikan sangat rendah, rasio derajat desentralisasi tergolong rendah, rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio efisiensi tergolong tidak efisien, rasio pengelolaan belanja menunjukkan penurunan tiap tahunnya, dan rasio keserasian menunjukkan tingkat keserasian yang lebih besar pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) mengenai analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram tahun 2012 – 2015 yang mendapatkan hasil bahwa rasio efektivitas Kota Mataram dikategorikan efektif, tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dikategorikan kurang efisien, kemandirian pengelolaan keuangan dikategorikan masih rendah, perhitungan aktivitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah, dan perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dikategorikan kurang baik.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian dalam penyusunan skripsi ini berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki penyerapan anggaran belanja yang rendah terutama pada pengadaan barang dan jasa dengan rata-rata realisasi sebesar 89,40%. Rendahnya realisasi belanja barang dan jasa disebabkan karena kualitas SDM yang rendah, proses tender yang lambat, dan adanya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana anggaran. Dampak dari serapan anggaran yang rendah ini akan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah karena banyaknya program yang tidak mencapai sasaran, seperti program pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta program investasi dan pengembangan usaha.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021 jika dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi?
2. Bagaimana hasil penilaian pada kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021 yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi.
2. Untuk menginterpretasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah lainnya mengenai penggunaan analisis rasio keuangan sebagai salah satu metode dalam menilai kinerja keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk mengukur dan menginterpretasikan hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kinerja keuangannya selama lima tahun anggaran. Adapun hasil dari pengukuran kinerja tersebut diraikan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021 memiliki rasio kemandirian rata-rata 63,41% dengan kategori sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan terhadap pendapatan transfer terutama pada dana alokasi khusus non fisik seperti alokasi dana BOS pendidikan dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD, serta meningkatnya perolehan pajak daerah yang berasal dari pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021 memiliki rasio efektivitas rata-rata 94,89% dengan kategori efektif. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan pajak karena dilakukannya reformasi struktur perpajakan serta adanya kebijakan mengenai *refocusing* dan realokasi APBD sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD.
 - c. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio efisiensi rata-rata 95,19% dengan kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan karena belanja hibah mengalami peningkatan yang dananya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dialokasikan kepada organisasi kemasyarakatan serta beberapa rumah sakit, adanya peningkatan pada program pembangunan dan perluasan ruas jalan, serta adanya peningkatan pada belanja gaji pokok PNS dan belanja tambahan penghasilan PNS. Dengan meningkatnya rasio efisiensi, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai belum optimal dalam menggali potensi pendapatan daerahnya, sementara itu realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperolehnya.

- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio pertumbuhan rata-rata 8,23%. Rasio pertumbuhan menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2017-2020, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pertumbuhan mengalami kecenderungan positif pada beberapa tahun dan mengalami pertumbuhan negatif pada satu tahun. Penurunan pertumbuhan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat sehingga sektor utama perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang berbasis komoditas ikut mengalami penurunan, selain itu terjadi penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatnya angka pengangguran sebagai dampak pandemi COVID-19. Kenaikan pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya capaian pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak rokok, pajak atas air, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan bermotor.
 - e. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio derajat desentralisasi rata-rata 37,97% dengan kategori cukup. Hal ini disebabkan karena tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor belum optimal, masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor dan adanya penerapan kebijakan terhadap kendaraan bekas pakai roda dua. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi.
2. Secara umum, jika ditinjau berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan derajat desentralisasi, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup baik dalam mengelola APBD-nya.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - a. Berdasarkan rasio kemandirian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD nya dengan meningkatkan perolehan pajak maupun retribusi daerah, agar dapat memperkecil tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan sistem elektronik perpajakan, sosialisasi rutin kepada masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak. Selain itu, untuk meningkatkan retribusi daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi, baik pemanfaatan jasa umum ataupun jasa usaha dan perizinan.
 - b. Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan komponen PAD yang belum mencapai sasaran seperti lain-lain PAD yang sah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan aset BMD (Barang Milik Daerah) melalui lelang secara rutin dan terencana, sehingga diharapkan perolehan PAD menjadi bertambah. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerja sama terhadap BUMD dan perusahaan swasta guna memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD, baik dalam bentuk pajak maupun dividen.
 - c. Berdasarkan rasio efisiensi terhadap perbelanjaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menggunakan dana belanjanya secara optimal terutama terhadap belanja operasi, agar penggunaan anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak terjadi pemborosan dana. Serta diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih memperhatikan perencanaan tata kelola, pelaporan dan memberikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran terhadap belanja tak terduga yang difokuskan dalam penanganan pandemi COVID-

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

19, agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran, guna memulihkan dan merangsang kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

- d. Berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan mengembangkan sektor daerah yang potensial seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan energi. Hal ini dapat dilakukan dengan modernisasi dan mekanisasi pertanian menggunakan teknologi terbaru agar lahan pertanian dapat tergarap secara maksimal, intensifikasi perikanan budidaya dengan meningkatkan produktivitas lahan dan media budidaya, percepatan pembangunan *double track* dan jalan khusus batubara, serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
 - e. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih bervariasi. Adapun hal yang dapat dilakukan berupa mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama tentang penilaian kinerja keuangan, diharapkan dapat menambah sumber data penelitian seperti data primer, dengan melakukan wawancara dan menggali data / informasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, agar hasil penelitian yang dihasilkan menjadi lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D. (2021). Dampak Pandemi, Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin. <https://mediaindonesia.com/nusantara/386166/dampak-pandemi-sumsel-masuk-10-provinsi-termiskin>
- Apriani, D. (2021). Tender Lambat, Sebabkan Serapan Anggaran di Sumatra Selatan Rendah. <https://mediaindonesia.com/nusantara/449725/tender-lambat-sebabkan-serapan-anggaran-di-sumatra-selatan-rendah>
- Apriyani, D. (2020). Pemprov Sumsel Terapkan Kendaraan Bekas Bisa Langsung Balik Nama. <https://mediaindonesia.com/nusantara/282310/pemprov-sumsel-terapkan-kendaraan-bekas-bisa-langsung-balik-nama>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*.
- Bappeda Sumsel. (2020). BAPPEDA Bersama BI, BPS dan UNSRI Bahas Perkembangan Ekonomi Sumsel Terkini & Prediksi Ekonomi Makro Triwulan III 2019. <https://bappeda.sumselprov.go.id/berita/947/bappeda-bersama-bi-bps-dan-unsri-bahas-perkembangan-ekonomi-sumsel-terkini-prediksi-ekonomi-makro-triwulan-iii-2019>
- BPBD Sumatera Selatan. Letak Geografis Provinsi Sumatera Selatan. <http://bpbd.sumselprov.go.id/>. (diakses 19 Juni 2022)
- BPKAD Sumatera Selatan. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan. <http://bpkad.sumselprov.go.id/>. (diakses 20 Juni 2022)
- BPK Sumsel. (2021). Refocusing dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid 19 di Pemprov Sumsel. <https://sumsel.bpk.go.id/2021/01/22/refocusing-dan-realokasi-anggaran-terkait-penanganan-covid-19-di-pemprov-sumsel/>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- BPS. (2019). Ekonomi Sumatera Selatan Triwulan IV-2018 Tumbuh 6,04 Persen. <https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/447/ekonomi-sumatera-selatan-triwulan-iv-2018-tumbuh-6-04-persen>
- CALK. (2017). Catatan Atas Laporan Keuangan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- CALK. (2018). Catatan Atas Laporan Keuangan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- CALK. (2019). Catatan Atas Laporan Keuangan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- CALK. (2020). Catatan Atas Laporan Keuangan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- CALK. (2021). Catatan Atas Laporan Keuangan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Dewantari, N. M. S., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014-2018. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 20-41.
- DJPB Sumsel. (2021). Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan. https://djp.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2021/6_Sumatera%20Selatan_TwI_2021.pdf
- DPR. (2019). Penerimaan Pajak Sumsel Capai 96 Persen. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23822/t/javascript>
- Elko, M. R. B. (2021). Sumsel optimalkan pajak daerah dari pungutan PBBKB. <https://sumsel.antaranews.com/berita/601417/sumsel-optimalkan-pajak-daerah-dari-pungutan-pbbkb>
- Febriansyah, D. (2022). PAD Sumsel 2021 Lampau Target, Tahun Ini Naik 5,68 Persen. <https://sumsel.inews.id/berita/pad-sumsel-2021-lampau-target-tahun-ini-naik-568-persen>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, et. al. (2022). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori Dan Aplikasi. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- JDIH Sumatera Selatan. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan. <http://jdih.sumselprov.go.id/>. (diakses 19 Juni 2022)
- Kemendagri. (2021). Serapan Anggaran Rendah, Pusat Terjunkan Tim Asistensi ke TujuhProvinsi. <https://www.idxchannel.com/economics/serapan-anggaran-rendah-pusat-terjunkan-tim-asistensi-ke-tujuh-provinsi>
- Kepmendagri. (1996). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahmudi. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- MAKI. (2021). MAKI Sumsel: Korupsi APBD Dimulai Sejak Proses Tender. <https://www.klikanggaran.com/opini/pr-115966420/maki-sumsel-korupsi-apbd-dimulai-sejak-proses-tender>
- Marbun, R. (2010). Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Marlissa, D. C., Murni, S., & Saerang, I. S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(2), 597-604.
- Nuritomo dan Rossieta. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Prasetyo, E. (2022). Sumsel Pasang Target Pajak Daerah Rp3,6 Triliun di Tahun 2022. <https://www.rmolsumsel.id/sumsel-pasang-target-pajak-daerah-rp36-triliun-di-tahun-2022>
- Pratama, A.H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Pratiwi, I. (2019). Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
- Putri, R. S., Fermansyah, D., Eliza, A., & Suharto, S. (2021). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 60-72.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Volume 1 No.01. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Volume 3 No.01.
- Rahmasari, A. G. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3).
- Saputra, D. (2021). KPPOD Sebut Penyerapan Rendah APBD Sebagai Masalah Klasik. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/9/1481007/kppod-sebut-penyerapan-rendah-apbd-sebagai-masalah-klasik>
- Sijabat, M. Y. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261-274.
- Sirait, L. R. N., & Ardiany, Y. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pareso Jurnal*, 4(1), 169-186.
- Suhardjono. (2011). *Penelitian di Bidang Teknik Pengairan*. Malang: Cakrawala Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1).
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

| NO | Uraian | Ref | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi 2017 | % | Realisasi 2016 |
|----|--|-------------|----------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1 | Pendapatan | 4.1.1 | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | 4.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 4.1.1.1.1 | 2.911.883.386.175,00 | 2.835.440.186.799,80 | 97,37 | 2.378.960.064.732,96 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.1.1.1.2 | 14.542.756.000,00 | 15.442.784.364,00 | 106,19 | 18.403.609.038,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.1.1.1.3 | 79.561.220.650,00 | | | |
| 6 | Lain-Lain PAD yang Sah | 4.1.1.1.4 | 159.373.633.400,00 | 55.702.074.349,60 | 70,01 | 62.837.135.004,93 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) | | 3.165.360.996.225,00 | 3.031.633.624.303,95 | 95,78 | 2.546.177.544.348,66 |
| 8 | Pendapatan Transfer | 4.1.1.2 | | | | |
| 9 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.1.1.2.1 | | | | |
| 10 | Bagi Hasil Pajak | 4.1.1.2.1.1 | 941.801.111.400,00 | 637.875.920.722,00 | 67,73 | 655.564.086.588,00 |
| 11 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 4.1.1.2.1.2 | 1.060.812.485.584,00 | 869.855.925.257,00 | 82,00 | 631.146.675.948,00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 4.1.1.2.3 | 1.624.813.435.000,00 | 1.697.697.617.000,00 | 104,50 | 1.071.421.391.000,00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 4.1.1.2.4 | 169.797.516.000,00 | 141.479.453.700,00 | 83,33 | 141.702.517.339,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 4.1.1.2.5 | 1.932.473.455.000,00 | 714.004.254.866,00 | 36,95 | 6.477.810.200,00 |
| 15 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat (11 s.d. 15) | | 5.729.688.002.984,00 | 4.061.113.371.545,00 | 70,88 | 2.506.312.481.085,00 |
| 16 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| 17 | Dana Penyesuaian | | | | | 1.515.802.126.424,00 |
| 18 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19) | | | | | 1.515.802.126.424,00 |
| 19 | Jumlah Pendapatan Transfer (16+20) | | 5.729.688.002.984,00 | 4.061.113.371.545,00 | 70,88 | 4.022.114.607.509,00 |
| 20 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 4.1.1.3 | | | | |
| 21 | Pendapatan Hibah | 4.1.1.3.1 | 3.358.000.000,00 | 4.233.296.734,00 | 126,07 | 3.354.520.000,00 |
| 22 | Pendapatan Lainnya | 4.1.1.3.2 | 13.069.780.200,71 | 1.098.967.849.217,01 | 8,40 | 11.134.257.816,67 |
| 23 | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (25 s.d. 26) | | 16.427.780.200,71 | 1.103.221.135.951,01 | 6,71 | 14.488.777.816,67 |
| 24 | TOTAL PENDAPATAN (7+27) | | 8.911.476.779.409,71 | 8.195.968.131.799,95 | 91,97 | 6.582.780.829.576,33 |
| 25 | Belanja | 4.1.2 | | | | |
| 26 | Belanja Operasi | 4.1.2.1 | | | | |
| 27 | Belanja Pegawai | 4.1.2.1.a | 1.507.607.030.100,00 | 1.458.701.975.782,00 | 96,76 | 655.085.575.419,00 |
| 28 | Belanja Barang dan Jasa | 4.1.2.1.b | 1.210.114.980.395,00 | 1.108.078.001.845,00 | 91,57 | 790.131.069.433,75 |
| 29 | Belanja Hibah | 4.1.2.1.c | 1.913.333.641.800,00 | 1.843.397.614.637,00 | 96,34 | 2.041.107.497.879,00 |
| 30 | Belanja Bantuan Sosial | 4.1.2.5 | 600.000.000,00 | 200.000.000,00 | 33,33 | 226.252.000,00 |
| 31 | Jumlah Belanja Operasi (32 s.d. 35) | | 4.631.655.652.295,00 | 4.410.377.592.244,00 | 95,22 | 3.486.569.394.311,75 |
| 32 | Belanja Modal | 4.1.2.6 | | | | |
| 33 | Belanja Modal Tanah | 4.1.2.6.a | 291.896.901.942,00 | 160.120.740.951,98 | 54,88 | 157.879.664.971,70 |
| 34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.1.2.6.b | 184.160.398.450,00 | 138.386.423.476,80 | 75,14 | 30.813.151.573,00 |
| 35 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.1.2.6.c | 496.236.389.875,00 | 393.141.847.625,00 | 80,19 | 67.787.498.460,00 |
| 36 | Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan | 4.1.2.6.d | 757.399.317.000,00 | 617.237.875.310,81 | 80,43 | 344.025.400.563,58 |
| 37 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.1.2.6.e | 54.844.627.907,00 | 54.827.304.957,00 | 99,97 | 2.216.516.800,00 |
| 38 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.1.2.6.f | 2.150.104.500,00 | 1.975.776.396,00 | 91,89 | 1.107.893.101,00 |
| 39 | Belanja Modal BLUD | 4.1.2.6.g | 15.601.074.900,00 | 11.692.709.798,00 | 74,97 | 3.910.801.276,00 |
| 40 | Jumlah Belanja Modal (39 s.d.45) | | 1.806.367.818.574,00 | 1.377.382.678.423,59 | 76,25 | 607.740.926.745,28 |
| 41 | Belanja Tak Terduga | 4.1.2.7 | | | | |
| 42 | Belanja Tak Terduga | 4.1.2.7 | 1.500.000.000,00 | 792.256.000,00 | 52,82 | 180.000.000,00 |
| 43 | Jumlah Belanja Tak Terduga (49) | | 1.500.000.000,00 | 792.256.000,00 | 52,82 | 180.000.000,00 |
| 44 | Jumlah Belanja (36 + 46+ 50) | | 6.438.023.470.869,00 | 5.788.552.526.667,59 | 89,89 | 4.094.471.321.477,03 |
| 45 | Transfer | 4.1.3 | | | | |
| 46 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 4.1.3.1 | | | | |
| 47 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 4.1.3.1.1 | 557.736.660.054,28 | 513.766.114.832,72 | 92,12 | 239.086.976.321,18 |
| 48 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (65) | | 557.736.660.054,28 | 513.766.114.832,72 | 92,12 | 239.086.976.321,18 |
| 49 | Transfer Bantuan Keuangan | 4.1.3.2 | | | | |
| 50 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 4.1.3.2.1 | 109.913.415.376,00 | 105.139.666.350,00 | 95,66 | 627.089.936.377,80 |
| 51 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 4.1.3.2.2 | 2.244.241.440,00 | 1.924.096.608,00 | 85,73 | 1.924.096.608,00 |
| 52 | Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (59 s.d. 60) | | 112.157.656.816,00 | 107.063.762.958,00 | 95,46 | 629.014.032.985,80 |
| 53 | Jumlah Transfer (56 + 61) | | 669.894.316.870,28 | 620.829.877.790,72 | 92,68 | 868.107.009.306,98 |
| 54 | JUMLAH BELAJA DAN TRANSFER (51+62) | | 7.107.417.787.739,28 | 6.409.382.404.458,31 | 90,15 | 4.962.572.330.754,01 |
| 55 | SURPLUS/DEFISIT (28-63) | | 1.802.058.991.670,43 | 1.786.585.727.341,65 | 99,14 | 1.620.208.598.892,32 |
| 56 | Pembiayaan | 4.1.4 | | | | |
| 57 | Penerimaan Pembiayaan | 4.1.4.1 | | | | |
| 58 | Penggunaan S/D PA | 4.1.4.1.1 | 64.859.618.385,33 | 64.859.465.661,33 | 99,99 | 35.579.268.821,76 |
| 59 | Penerimaan Kembali Pinjaman | | | | | 9.281.344.441,60 |
| 60 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d. 68) | | 64.859.618.385,33 | 64.859.465.661,33 | 100,00 | 44.860.613.263,36 |
| 61 | Pengeluaran Pembiayaan | 4.1.4.2 | | | | |
| 62 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 4.1.4.2.1 | 7.200.000.000,00 | 7.199.146.283,00 | 99,99 | 45.000.000.000,00 |
| 63 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri | 4.1.4.2.2 | 1.859.718.610.056,76 | 1.803.264.170.657,86 | 96,96 | 1.555.209.593.770,35 |
| 64 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (72 s.d. 73) | | 1.866.918.610.056,76 | 1.810.463.316.940,86 | 96,98 | 1.600.209.593.770,35 |
| 65 | Pembiayaan Netto (69-74) | | (1.802.058.991.670,43) | (1.745.603.851.279,53) | 96,87 | (1.555.348.980.506,99) |
| 66 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (64+75) | 4.1.5 | | 40.981.876.062,12 | | 64.859.618.385,33 |

- Hak Cipta :
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

| NO | Uraian | Ref | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|----|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | Pendapatan | 4.1.1 | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | 4.1.1.1 | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 4.1.1.1.1 | 2.990.093.000.000,00 | 3.197.900.645.678,09 | 108,95 | 2.835.440.186.799,80 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.1.1.1.2 | 10.618.399.000,00 | 11.915.489.824,62 | 112,22 | 15.442.784.364,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.1.1.1.3 | 86.765.902.171,00 | 82.855.120.842,54 | 95,49 | 55.702.074.349,60 |
| 6 | Lain-Lain PAD yang Sah | 4.1.1.1.4 | 362.113.327.665,14 | 236.339.456.038,29 | 64,99 | 125.048.676.790,55 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) | | 3.449.590.628.837,14 | 3.528.010.712.183,54 | 102,27 | 3.031.633.624.303,95 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Pendapatan Transfer | 4.1.1.2 | | | | |
| 10 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.1.1.2.1 | | | | |
| 11 | Bagi Hasil Pajak | 4.1.1.2.1.a | 832.710.280.807,00 | 707.050.385.631,00 | 84,91 | 637.875.920.722,00 |
| 12 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 4.1.1.2.1.b | 907.055.046.492,00 | 936.907.319.894,00 | 103,29 | 869.895.825.257,00 |
| 13 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 4.1.1.2.1.c | 1.697.897.817.000,00 | 1.697.762.032.483,00 | 99,99 | 1.697.897.817.000,00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 4.1.1.2.1.d | 356.276.110.000,00 | 345.416.117.580,00 | 96,95 | 141.479.453.700,00 |
| 15 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 4.1.1.2.1.e | 1.882.746.130.000,00 | 1.825.881.664.826,00 | 96,98 | 714.004.254.866,00 |
| 16 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat (11 s.d. 15) | | 5.676.685.384.299,00 | 5.513.017.500.414,00 | 97,12 | 4.061.113.371.545,00 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 4.1.1.2.2 | | | | |
| 19 | Dana Penyesuaian | 4.1.1.2.2 | 64.750.000.000,00 | 64.750.000.000,00 | - | - |
| 20 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19) | | 64.750.000.000,00 | 64.750.000.000,00 | - | - |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer (16+20) | | 5.741.435.384.299,00 | 5.577.767.500.414,00 | 97,15 | 4.061.113.371.545,00 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 4.1.1.3 | | | | |
| 25 | Pendapatan Hibah | 4.1.1.3.1 | 5.016.411.320,00 | 4.188.163.778,00 | 83,49 | 4.233.286.734,00 |
| 26 | Pendapatan Lainnya | 4.1.1.3.2 | 435.500.000,00 | 31.405.018.724,25 | 7,2126 | 1.098.987.849.217,01 |
| 27 | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (25 s.d. 26) | | 5.451.911.320,00 | 4.513.182.502,25 | 82,86 | 1.103.221.351.911,01 |
| 28 | TOTAL PENDAPATAN (7+22+27) | | 9.196.477.924.456,14 | 9.141.371.395.099,79 | 99,40 | 8.195.968.131.799,96 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | Belanja | 4.1.2 | | | | |
| 31 | Belanja Operasi | 4.1.2.1 | | | | |
| 32 | Belanja Pegawai | 4.1.2.1.a | 1.774.200.010.750,00 | 1.657.583.970.192,00 | 93,43 | 1.458.701.975.762,00 |
| 33 | Belanja Barang dan Jasa | 4.1.2.1.b | 1.506.908.550.153,00 | 1.375.068.372.158,94 | 91,25 | 1.108.078.001.845,00 |
| 34 | Belanja Hibah | 4.1.2.1.c | 2.449.126.082.605,00 | 2.193.698.605.052,00 | 89,57 | 1.843.397.614.637,00 |
| 35 | Belanja Bantuan Sosial | 4.1.2.1.d | - | - | - | 200.000.000,00 |
| 36 | Jumlah Belanja Operasi (32 s.d. 35) | | 5.730.234.643.508,00 | 5.226.350.947.402,94 | 91,21 | 4.410.377.592.244,00 |
| 37 | | | | | | |
| 38 | Belanja Modal | 4.1.2.2 | | | | |
| 39 | Belanja Modal Tanah | 4.1.2.2.a | 165.449.046.689,00 | 158.483.005.872,00 | 95,79 | 160.120.740.951,98 |
| 40 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.1.2.2.b | 240.239.014.336,00 | 234.233.678.553,05 | 97,50 | 138.386.423.476,80 |
| 41 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.1.2.2.c | 360.886.221.959,60 | 330.923.042.841,60 | 91,70 | 393.141.847.625,00 |
| 42 | Belanja Modal Jalan, Inggai dan Jaringan | 4.1.2.2.d | 798.028.873.499,52 | 700.921.021.324,50 | 87,83 | 617.237.875.310,81 |
| 43 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.1.2.2.e | 64.552.072.000,00 | 84.145.081.628,00 | 99,37 | 54.827.304.957,00 |
| 44 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.1.2.2.f | 4.517.900.000,00 | 4.438.009.000,00 | 98,23 | 1.975.776.396,00 |
| 45 | Belanja Modal BLUD | 4.1.2.2.g | 23.682.963.065,83 | 13.634.775.692,00 | 57,57 | 11.852.709.706,00 |
| 46 | Belanja Modal BOS | 4.1.2.2.h | 33.179.620.000,00 | 30.496.490.857,00 | 91,91 | - |
| 47 | Jumlah Belanja Modal (39 s.d. 46) | | 1.890.535.413.549,95 | 1.537.275.105.765,15 | 80,93 | 1.377.382.678.423,89 |
| 48 | | | | | | |
| 49 | Belanja Tak Terduga | 4.1.2.3 | | | | |
| 50 | Belanja Tak Terduga | 4.1.2.3 | 6.000.000.000,00 | 134.480.200,00 | 2,24 | 792.256.000,00 |
| 51 | Jumlah Belanja Tak Terduga (50) | | 6.000.000.000,00 | 134.480.200,00 | 2,24 | 792.256.000,00 |
| 52 | Jumlah Belanja (50 + 47+ 51) | | 7.426.770.057.057,95 | 6.763.760.533.371,09 | 91,07 | 5.788.552.526.667,89 |
| 53 | | | | | | |
| 54 | Transfer | 4.1.3 | | | | |
| 55 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 4.1.3.1 | | | | |
| 56 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 4.1.3.1 | 1.145.725.100.000,00 | 1.098.298.247.303,69 | 95,86 | 513.766.114.832,72 |
| 57 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (56) | | 1.145.725.100.000,00 | 1.098.298.247.303,69 | 95,86 | 513.766.114.832,72 |
| 58 | | | | | | |
| 59 | Transfer Bantuan Keuangan | 4.1.3.2 | | | | |
| 60 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 4.1.3.2.1 | 99.488.505.600,00 | 77.212.307.163,00 | 77,61 | 105.130.666.350,00 |
| 61 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 4.1.3.2.2 | 4.835.265.600,00 | 1.872.582.264,00 | 38,73 | 1.924.096.608,00 |
| 62 | Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (60 s.d. 61) | | 104.323.771.200,00 | 79.084.889.427,00 | 75,81 | 107.063.762.958,00 |
| 63 | Jumlah Belanja (57 + 62) | | 1.250.048.871.200,00 | 1.177.383.136.730,69 | 94,19 | 620.829.877.790,72 |
| 64 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (52 +63) | | 8.676.818.928.257,95 | 7.941.143.670.101,78 | 91,52 | 6.409.382.404.458,31 |
| 65 | SURPLUS/DEFISIT (28-64) | | 519.658.996.198,19 | 1.200.227.724.998,01 | 230,96 | 1.786.585.727.341,65 |
| 66 | Pembayaran | 4.1.4 | | | | |
| 67 | Penerimaan Pembayaran | 4.1.4.1 | | | | |
| 68 | Penggunaan SILPA | 4.1.4.1.1 | 40.981.876.062,12 | 40.929.016.279,12 | 99,99 | 64.859.465.661,33 |
| 69 | Penerimaan Kembali Piutang | - | - | - | - | - |
| 70 | Jumlah Penerimaan Pembayaran (68 s.d. 69) | | 40.981.876.062,12 | 40.929.016.279,12 | 99,87 | 64.859.465.661,33 |
| 71 | | | | | | |
| 72 | Pengeluaran Pembayaran | 4.1.4.2 | | | | |
| 73 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 4.1.4.2.1 | 70.100.000.000,00 | 70.099.615.000,00 | 99,99 | 7.199.146.283,00 |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 4.1.4.2.2 | 490.540.872.260,31 | 490.540.872.260,31 | 100,00 | 1.803.264.170.657,86 |
| 75 | Jumlah Pengeluaran Pembayaran (73 s.d. 74) | | 560.640.872.260,31 | 560.640.487.260,31 | 99,99 | 1.810.463.176.940,86 |
| 76 | Pembayaran Netto (70-75) | | (519.658.996.198,19) | (519.711.470.981,19) | 100,010 | (1.745.603.851.279,53) |
| 77 | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (65+76) | 4.1.5 | | | | 40.961.876.062,12 |

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (dalam rupiah) | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | ANGGARAN 2019 | REALISASI 2019 (Audited) | % | REALISASI 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | 9.849.942.842.746,55 | 9.280.742.072.448,62 | 94,22 | 9.141.371.395.099,79 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) | 3.436.828.903.746,55 | 3.494.510.853.251,62 | 101,68 | 3.528.010.712.183,54 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 3.071.784.718.796,00 | 3.145.508.634.339,38 | 102,40 | 3.197.900.645.678,09 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 9.136.079.600,00 | 12.038.355.783,00 | 131,77 | 11.915.489.824,62 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 89.676.728.820,00 | 90.304.005.859,82 | 100,70 | 82.855.120.642,54 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 266.231.376.530,55 | 246.609.857.269,42 | 92,63 | 235.339.456.038,29 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 6.381.903.769.000,00 | 5.765.176.417.582,00 | 90,34 | 5.577.767.500.414,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.315.428.531.000,00 | 5.698.701.179.582,00 | 90,23 | 5.513.017.500.414,00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 860.077.454.680,00 | 763.809.161.523,00 | 88,81 | 707.050.365.631,00 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 1.353.654.217.320,00 | 931.599.821.119,00 | 68,82 | 936.907.319.894,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.743.742.960.000,00 | 1.743.742.960.000,00 | 100,00 | 1.697.762.032.483,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 267.864.216.000,00 | 231.438.783.947,00 | 86,40 | 345.416.117.580,00 |
| 4.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 2.090.089.683.000,00 | 2.028.050.952.993,00 | 97,03 | 1.825.881.664.826,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 66.475.238.000,00 | 66.475.238.000,00 | 100,00 | 64.750.000.000,00 |
| 4.2.2.3 | Dana Penyesuaian | 66.475.238.000,00 | 66.475.238.000,00 | 100,00 | 64.750.000.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 31.210.170.000,00 | 21.054.801.615,00 | 67,46 | 35.593.182.502,25 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 30.253.041.000,00 | 20.415.551.615,00 | 67,48 | 4.188.163.378,00 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 957.129.000,00 | 639.250.000,00 | 66,79 | 31.405.018.724,25 |
| 5 | BELANJA | 7.074.829.339.229,22 | 6.422.760.771.550,39 | 90,78 | 6.763.760.533.371,09 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 7.248.661.128.369,95 | 4.812.470.138.975,13 | 66,41 | 5.226.350.947.402,94 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.859.449.878.516,00 | 1.757.169.664.436,00 | 94,50 | 1.657.583.970.192,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.656.097.451.834,20 | 1.405.117.520.744,41 | 84,85 | 1.375.068.372.158,94 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 1.733.113.798.013,75 | 1.650.182.953.794,72 | 95,21 | 2.193.698.605.052,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.820.168.210.865,27 | 1.606.219.507.432,26 | 88,23 | 1.537.275.105.766,13 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 64.947.798.333,00 | 15.660.145.800,00 | 24,11 | 158.483.005.872,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 197.979.303.255,40 | 178.074.539.452,10 | 89,95 | 234.233.678.553,05 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 173.951.937.468,00 | 163.759.995.106,62 | 94,14 | 330.923.042.841,60 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irtigas dan Jaringan | 1.154.622.729.147,87 | 1.122.895.786.652,54 | 97,25 | 700.921.021.324,50 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 34.538.330.000,00 | 8.207.828.450,00 | 23,76 | 64.145.081.628,00 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 94.682.311.025,00 | 87.072.327.901,00 | 91,96 | 4.438.000.000,00 |
| 5.2.7 | Belanja Modal BLUD | 23.524.489.830,00 | 9.606.870.689,00 | 40,84 | 13.634.775.692,00 |
| 5.2.8 | Belanja Modal BOS | 75.921.311.816,00 | 20.942.013.381,00 | 27,58 | 30.496.490.857,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 6.000.000.000,00 | 4.071.125.143,00 | 67,85 | 134.480.200,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 6.000.000.000,00 | 4.071.125.143,00 | 67,85 | 134.480.200,00 |
| 6 | TRANSFER | 3.459.096.286.929,62 | 3.195.313.742.290,41 | 92,37 | 1.177.383.136.730,69 |
| 6.1 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 2.567.660.043.982,10 | 2.511.829.112.109,10 | 97,83 | 1.098.298.247.303,69 |
| 6.1.1 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 2.567.660.043.982,10 | 2.511.829.112.109,10 | 97,83 | 1.098.298.247.303,69 |
| 6.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 891.436.242.947,52 | 683.484.630.181,31 | 76,67 | 79.084.888.427,00 |
| 6.2.1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 802.025.977.347,52 | 594.074.364.581,31 | 74,07 | 77.212.307.163,00 |
| 6.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 84.575.000.000,00 | 84.575.000.000,00 | 100,00 | - |
| 6.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 4.835.265.600,00 | 4.835.265.600,00 | 100,00 | 1.872.582.264,00 |
| 7 | SURPLUS / (DEFISIT) | (683.982.783.412,29) | (337.332.441.392,18) | 49,32 | 1.200.227.724.998,01 |
| 7.1 | PEMBIAYAAN | 686.982.783.412,29 | 686.485.024.490,78 | 99,93 | 40.929.016.279,12 |
| 7.1.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 686.982.783.412,29 | 686.485.024.490,78 | 99,93 | 40.929.016.279,12 |
| 7.1.1.1 | Penggunaan SILPA | - | - | - | - |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 3.000.000.000,00 | - | - | 560.640.487.260,31 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00 | - | - | 70.099.615.000,00 |
| 7.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | 490.540.872.260,31 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 683.982.783.412,29 | 686.485.024.490,78 | 100,37 | (519.711.470.981,19) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 349.152.583.098,60 | - | 680.516.254.016,82 |

JAKARTA

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| (dalam rupiah) | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | ANGGARAN 2020 | REALISASI 2020 (Audited) | % | REALISASI 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | 9.924.882.093.098,75 | 9.278.520.060.062,03 | 93,49 | 9.280.742.072.448,62 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.617.058.256.621,75 | 3.375.100.984.842,03 | 93,31 | 3.494.510.853.251,62 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 2.921.284.319.384,00 | 3.081.800.984.699,61 | 105,49 | 3.145.558.634.339,38 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 10.222.939.873,00 | 8.234.552.913,00 | 80,55 | 12.038.355.783,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 92.907.300.000,00 | 82.836.132.369,66 | 89,16 | 90.304.005.859,82 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 592.643.697.364,75 | 202.229.314.859,76 | 34,12 | 246.609.857.269,42 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 6.274.590.071.477,00 | 5.875.896.342.538,00 | 93,65 | 5.765.176.417.582,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.234.368.422.477,00 | 5.835.674.693.538,00 | 93,60 | 5.698.701.179.582,00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 925.989.028.502,00 | 619.042.908.415,00 | 66,85 | 763.869.161.523,00 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 1.354.153.953.975,00 | 1.314.226.460.685,00 | 97,05 | 931.599.821.119,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.575.373.367.000,00 | 1.568.602.615.000,00 | 99,57 | 1.743.742.960.000,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 207.073.084.000,00 | 203.718.863.552,00 | 98,38 | 231.438.283.947,00 |
| 4.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 2.171.778.989.000,00 | 2.130.083.845.886,00 | 98,08 | 2.028.050.952.993,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 40.221.649.000,00 | 40.221.649.000,00 | 100,00 | 66.475.238.000,00 |
| 4.2.2.3 | Dana Penyesuaian | 40.221.649.000,00 | 40.221.649.000,00 | 100,00 | 66.475.238.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 33.233.765.000,00 | 27.522.732.682,00 | 82,82 | 21.054.801.615,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 32.641.765.000,00 | 26.967.232.682,00 | 82,62 | 20.415.551.615,00 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 592.000.000,00 | 555.500.000,00 | 93,83 | 639.250.000,00 |
| 5 | BELANJA | 7.901.928.827.814,38 | 6.900.475.143.744,16 | 87,33 | 6.422.760.771.550,39 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 5.387.261.671.082,86 | 5.038.670.309.775,65 | 93,53 | 4.812.470.138.975,13 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.965.041.467.060,34 | 1.771.524.397.218,00 | 90,15 | 1.757.169.664.436,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.522.451.937.658,71 | 1.392.760.537.519,30 | 91,48 | 1.405.117.520.744,41 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 1.893.371.025.508,75 | 1.873.445.636.520,56 | 98,95 | 1.650.182.953.794,72 |
| 5.1.7 | Belanja Provisi | 6.397.240.855,06 | 939.738.517,79 | 14,69 | - |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 2.300.677.274.954,52 | 1.664.700.767.363,54 | 72,36 | 1.606.219.507.432,26 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 25.996.202.296,02 | 14.597.408.000,21 | 56,15 | 15.660.145.800,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 202.321.540.968,00 | 181.062.816.387,17 | 89,49 | 178.074.539.452,10 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 217.728.760.874,00 | 201.564.960.984,78 | 92,58 | 163.750.095.106,62 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.324.714.718.829,50 | 904.310.171.568,49 | 68,26 | 1.122.895.786.652,54 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 90.534.093.767,00 | 53.768.783.085,00 | 59,39 | 8.207.828.450,00 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 293.649.013.100,00 | 215.967.588.496,51 | 73,55 | 87.072.327.900,00 |
| 5.2.7 | Belanja Modal BLUD | 18.088.645.120,00 | 12.330.403.046,38 | 68,17 | 9.606.870.689,00 |
| 5.2.8 | Belanja Modal BOS | 127.644.300.000,00 | 81.098.635.795,00 | 63,53 | 20.942.013.381,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 213.989.881.777,00 | 197.104.066.604,97 | 92,11 | 4.071.125.143,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 213.989.881.777,00 | 197.104.066.604,97 | 92,11 | 4.071.125.143,00 |
| 6 | TRANSFER | 2.760.960.997.038,32 | 2.617.288.350.221,73 | 94,80 | 3.195.313.742.290,41 |
| 6.1 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 1.476.788.949.690,80 | 1.455.636.933.603,00 | 98,57 | 2.511.829.112.109,10 |
| 6.1.1 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 1.476.788.949.690,80 | 1.455.636.933.603,00 | 98,57 | 2.511.829.112.109,10 |
| 6.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 1.284.172.047.347,52 | 1.161.651.416.618,73 | 90,46 | 683.484.630.181,31 |
| 6.2.1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 1.276.472.047.347,52 | 1.153.951.416.618,73 | 90,40 | 594.074.364.581,31 |
| 6.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 7.700.000.000,00 | 7.700.000.000,00 | 100,00 | 84.575.000.000,00 |
| 6.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | - | - | - | 4.835.265.600,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (738.007.731.753,95) | (239.243.433.903,86) | 32,42 | 337.332.441.392,18 |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 857.122.633.305,95 | 474.977.880.806,42 | 55,42 | 686.485.024.490,78 |
| 7.1.1 | Penggunaan SILPA | 349.155.866.930,60 | 349.234.370.470,42 | 100,02 | 686.485.024.490,78 |
| 7.1.4 | Pinjaman Dalam Negeri | 507.966.766.375,35 | 125.743.510.336,00 | 24,75 | - |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 119.114.901.552,00 | 114.114.901.552,00 | - | 560.640.487.760,31 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 119.114.901.552,00 | 114.114.901.552,00 | - | 70.099.615.000,00 |
| 7.2.3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | 490.540.872.760,31 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 738.007.731.753,95 | 360.862.979.254,42 | 48,90 | (519.711.470.981,19) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 121.619.545.350,56 | - | 349.152.583.098,60 |

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam rupiah) | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Ref. | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
| 4 | PENDAPATAN | 4.1.1 | 10.800.944.019.387,00 | 9.611.291.244.667,17 | 88,99 | 9.278.520.060.062,03 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) | 4.1.1.1 | 4.747.088.053.007,00 | 3.865.463.033.085,17 | 81,43 | 3.375.100.984.842,03 |
| 4.1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 4.1.1.1.1 | 3.500.243.740.082,00 | 3.523.785.342.246,24 | 100,67 | 3.081.800.984.699,61 |
| 4.1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.1.1.1.2 | 7.601.707.223,00 | 9.313.749.306,00 | 122,52 | 8.234.552.913,00 |
| 4.1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.1.1.1.3 | 101.209.528.648,00 | 65.714.183.659,07 | 64,93 | 82.836.132.369,66 |
| 4.1.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 4.1.1.1.4 | 1.138.033.077.054,00 | 266.649.757.873,86 | 23,43 | 202.229.314.859,76 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 4.1.1.2 | 6.009.694.627.380,00 | 5.712.683.072.712,00 | 95,06 | 5.875.896.342.538,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.1.1.2.1 | 6.009.694.627.380,00 | 5.712.683.072.712,00 | 95,06 | 5.835.674.693.538,00 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 4.1.1.2.1.a | 6.009.694.627.380,00 | 5.712.683.072.712,00 | 95,06 | 5.835.674.693.538,00 |
| 4.2.1.1.1 | Dana Bagi Hasil | 4.1.1.2.1.a.b | 2.090.318.706.818,00 | 1.891.734.449.581,00 | 90,50 | 1.933.269.369.100,00 |
| 4.2.1.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 4.1.1.2.1.c | 1.569.812.039.000,00 | 1.563.041.287.000,00 | 99,57 | 1.568.602.615.000,00 |
| 4.2.1.1.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 4.1.1.2.1.d | 246.085.361.448,00 | 220.514.359.267,00 | 89,61 | 203.718.863.552,00 |
| 4.2.1.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 4.1.1.2.1.e | 2.103.478.520.114,00 | 2.037.392.976.864,00 | 96,86 | 2.130.083.845.886,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 4.1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.221.649.000,00 |
| 4.2.2.3 | Dana Penyesuaian | 4.1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.221.649.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 4.1.1.3 | 44.161.339.000,00 | 33.145.138.870,00 | 75,05 | 27.522.732.682,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 4.1.1.3.1 | 44.161.339.000,00 | 33.145.138.870,00 | 75,05 | 26.967.232.682,00 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya | 4.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.500.000,00 |
| 5 | BELANJA | 4.1.2 | 11.410.177.341.872,00 | 10.060.730.260.979,39 | 88,17 | 9.517.763.493.965,89 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.1.2.1 | 5.830.058.901.452,00 | 5.365.031.503.749,49 | 92,02 | 5.038.670.309.775,65 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 4.1.2.1.1 | 2.089.417.475.499,00 | 1.923.290.549.742,00 | 92,05 | 1.771.524.397.218,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.1.2.1.2 | 2.062.603.115.941,00 | 1.811.885.209.417,49 | 87,84 | 1.392.760.537.519,30 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 4.1.2.1.3 | 4.000.000.000,00 | 382.096.916,00 | 9,55 | 939.738.517,79 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 4.1.2.1.4 | 1.673.935.310.012,00 | 1.629.473.647.674,00 | 97,34 | 1.873.445.636.520,56 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Sosial | 4.1.2.1.5 | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 4.1.2.2 | 2.191.283.655.818,00 | 1.836.834.114.021,94 | 83,82 | 1.664.700.767.363,54 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 4.1.2.2.1 | 79.703.529.691,00 | 70.853.405.527,00 | 88,90 | 14.597.408.000,21 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.1.2.2.2 | 336.930.132.385,70 | 288.834.883.969,24 | 85,73 | 181.062.816.387,17 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.1.2.2.3 | 324.974.441.062,30 | 289.050.835.757,28 | 88,95 | 201.564.960.984,78 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.1.2.2.4 | 1.365.201.497.824,00 | 1.107.398.086.860,42 | 81,12 | 904.310.171.568,49 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.1.2.2.5 | 84.474.054.855,00 | 80.096.901.908,00 | 95,53 | 53.768.783.085,00 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 4.1.2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.967.588.496,51 |
| 5.2.7 | Belanja Modal BLUD | 4.1.2.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330.403.046,38 |
| 5.2.8 | Belanja Modal BOS | 4.1.2.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.098.635.795,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 4.1.2.3 | 15.000.000.000,00 | 14.055.098.162,00 | 93,70 | 197.104.066.604,97 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 4.1.2.3 | 15.000.000.000,00 | 14.055.098.162,00 | 93,70 | 197.104.066.604,97 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 4.1.2.4 | 3.373.834.784.602,00 | 2.844.809.545.045,96 | 84,32 | 2.617.288.350.221,73 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 4.1.2.4.1 | 1.849.505.412.524,00 | 1.579.375.912.863,60 | 85,39 | 1.455.636.933.603,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 4.1.2.4.2 | 1.524.329.371.978,00 | 1.265.433.632.182,36 | 83,02 | 1.161.651.416.618,73 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | -609.233.322.485,00 | -449.439.016.312,22 | 73,77 | -239.243.433.903,86 |
| 6 | PEMBIAYAAN | 4.1.3 | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | 711.643.322.485,00 | 615.159.551.422,81 | 86,44 | 474.977.880.806,42 |
| 6.1.1 | Penggunaan SILPA | 4.1.3.1 | 121.594.476.750,00 | 121.593.374.660,10 | 100,00 | 349.234.370.470,42 |
| 6.1.4 | Pinjaman Dalam Negeri | 4.1.3.1 | 590.048.845.735,00 | 493.566.176.762,71 | 83,65 | 125.743.510.336,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | 102.410.000.000,00 | 86.000.000.000,00 | 83,98 | 114.114.901.552,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 4.1.3.2 | 102.410.000.000,00 | 86.000.000.000,00 | 83,98 | 114.114.901.552,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | 609.233.322.485,00 | 529.159.551.422,81 | 86,86 | 360.862.979.254,42 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 4.1.4 | 0,00 | 79.720.535.110,59 | 100,00 | 121.619.545.350,56 |

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta